

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2013



Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13950

Telp. 4805255 Fax. 4803856

E-mail : admin@ptun-jakarta.go.id

Website : <http://www.ptun-jakarta.go.id>



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang

Telp. 4805255 Fax. 4803856

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13950

e-mail : admin@ptun-jakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta Timur, 31 Desember 2013

Kuasa Pengguna Anggaran,
Panitera/Sekretaris,

WAHIDIN,SH., MM.

NIP 195808111983031005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel dan Lampiran	iii
Ringkasan	1
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	9
III. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	22
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	22
B.2. Belanja Negara	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
C.1. Aset Lancar	30
C.2. Aset Tetap	34
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	40
C.4. Aset Lainnya	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas Dana Lancar	45
C.7. Ekuitas Dana Investasi.....	46
D. Pengungkapan Penting Lainnya	46
D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	46
D.2. Pengungkapan Lain-lain	47
Laporan-laporan Pendukung.....	51
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	52
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	54

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	20
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	21
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPA TA 2013	22
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2013 dan TA 2012.....	23
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	24
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013	24
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012	25
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012.....	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012	28
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012.....	29
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	30
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	31
Tabel 15 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) .	32
Tabel 16 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	33
Tabel 17 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2013 dan 31 Desember 2012.....	34
Tabel 18 Rincian Aset Tetap.....	34
Tabel 19 Rincian Saldo Tanah TA 2013	35
Tabel 20 Rincian Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin	35
Tabel 21 Rincian Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan.....	37
Tabel 22 Rincian Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	38
Tabel 23 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya	38
Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	40

Tabel 25 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	40
Tabel 26 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	42
Tabel 27 Rincian Aset Lainnya.....	42
Tabel 28 Rincian Aset tak Berwujud	43
Tabel 29 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012.....	44
Tabel 30 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	43
Tabel 31 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012	45
Tabel 32 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013	53
Tabel 33 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	55

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14.052.832. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp10.866.960.056. atau mencapai 97,58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.136.378.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Real Thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	14.052.832	0,00	25.697.072
Belanja Negara	11.136.378.000	10.866.960.056	97,58	6.002.115.609

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.393.576.288, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp16.056.986; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp15.262.935.694; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp11.223.608; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp103.360.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp84.694.550. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp84.694.550. dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp15.308.881.738., yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp(68.618.764) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp15.377.500.502.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	16.056.986	15.281.149	775.837	5,07
Aset Tetap	15.262.935.694	16.501.259.962	(1.238.324.268)	(7,50)
Aset Lainnya	103.360.000	179.902.006	(76.542.006)	(42,54)
Jumlah Aset	15.393.576.288	16.711.407.921	(1.317.831.632)	(7,88)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	84.694.550	414.672.600	(329.978.050)	(79,57)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	84.694.550	414.672.600	(329.978.050)	(79,57)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	(68.618.764)	(399.372.652)	330.753.888	(82,81)
Ekuitas Dana Investasi	15.377.500.502	16.696.107.972	(1.318.607.470)	(7,89)
Jumlah Ekuitas Dana	15.308.881.738	16.296.735.320	(987.853.582)	(6,06)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	15.393.576.288	16.711.407.920	(1.317.831.632)	(7,88)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

***PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB***



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang Jakarta Timur - DKI Jakarta 13950

Telp. 4805255 Fax. 4803856 e-mail : admin@ptun-jakarta.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta Timur, 31 Desember 2013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Panitera/Sekretaris,

WAHIDIN,SH., MM.

NIP 195808111983031005

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2013			TA 2012
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	14.052.832	0,00	25.697.072
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	14.052.832	0,00	25.697.072
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	8.117.718.000	8.084.264.145	99,58	4.804.509.468
2.	Belanja Barang	B.2.2.	940.125.000	816.985.111	86,90	806.378.641
3.	Belanja Modal	B.2.3.	2.078.535.000	1.965.710.800	94,57	391.227.500
	Jumlah Belanja Negara		11.136.378.000	10.866.960.056	97,58	6.002.115.609

* Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET				
Aset Lancar	C.1			
Kas dan Bank				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.		0	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C.1. 2.		3.759.996	3.759.996
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi	C.1. 3.		(18.800)	(18.800)
Persediaan	C.1. 4.		12.315.790	11.539.952
Jumlah Aset Lancar			16.056.986	15.281.149
Aset Tetap	C.2			
Tanah	C.2. 1.		10.149.656.000	10.149.656.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.		2.392.563.534	2.392.613.562
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.		5.960.527.427	3.945.710.400
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.		13.200.000	13.200.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.		2.763.400	80.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.		(3.255.774.667)	0
Jumlah Aset Tetap			15.262.935.694	16.501.259.962
Piutang Jangka Panjang	C.3			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi	C.3. 1.		11.280.008	15.040.004
Penyisihan Piutang tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi	C.3. 2.		(56.400)	(75.200)
Jumlah Piutang Jangka Panjang			11.223.608	14.964.804

Aset Lainnya	C.4				
Aset tak Berwujud	C.4.	1.	103.360.000	103.360.000	
Aset Lain-Lain	C.4.	2.	34.006	76.542.006	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.	3.	(34.006)	0	
Jumlah Aset Lainnya			103.360.000	179.902.006	
Jumlah Aset			15.393.576.288	16.711.407.920	
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.5				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.	1.	84.694.550	414.672.600	
Uang Muka dari KPPN	C.5.	2.	0	0	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			84.694.550	414.672.600	
Jumlah Kewajiban			84.694.550	414.672.600	
EKUITAS					
Ekuitas Dana Lancar	C.6				
Cadangan Piutang	C.6.	1.	3.759.996	3.759.996	
Cadangan Persediaan	C.6.	2.	12.315.790	11.539.952	
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.	3.	(84.694.550)	(414.672.600)	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar			(68.618.764)	(399.372.652)	
Ekuitas Dana Investasi	C.7				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.	1.	15.262.935.694	16.501.259.962	
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.	2.	114.564.808	194.848.010	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi			15.377.500.502	16.696.107.972	
Jumlah Ekuitas Dana			15.308.881.738	16.296.735.320	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana			15.393.576.288	16.711.407.920	

* Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. CATATAN ATAS LAPORAN

III. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Tahun 2013 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2010 – 2014 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG AGAR TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG MODERN, INDEPENDEN, BERTANGGUNG JAWAB, KREDIBEL, MENJUNJUNG TINGGI HUKUM DAN KEADILAN” yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi peradilan yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3.) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada

bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4.) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5.) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6.) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

(7.) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :*
Rp
14.052.832

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL, Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp14.052.832. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2013

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5.735.858	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	1.403	0,00
4.	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	3.446.663	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1.868.908	0,00
6.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3.000.000	0,00
	Total Pendapatan	0	14.052.832	0,00

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami penurunan sebesar 45,31 persen dari realisasi pendapatan PNBP TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Penurunan PNBP pada Semester II Tahun 2013 disebabkan adanya pengalihan dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) menjadi DIPA 05 (Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara).
2. Penurunan Realisasi Pendapatan PNBP pada Semester II Tahun 2013 disebabkan

karena pada Tahun 2012 terdapat Pendapatan Negara yang bersumber dari Penghapusan Barang Milik Negara sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112A/BUA/SK/VII/2012 Tanggal 12 Juli 2012 berupa Kendaraan Dinas Roda Dua yang kemudian dimasukkan ke dalam PNBP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp36.000.000.

3. Penurunan Pendapatan PNBP pada Semester II Tahun 2013 dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji karena telah berakhirnya masa angsuran pengembalian persekot gaji.

Selain mengalami penurunan pada TA 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga memperoleh kenaikan antara lain :

1. Kenaikan sebesar 3.01 persen dengan nilai sebesar Rp5.735.858 yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan ketentuan PMK No.33/PMK.06/2012 tentang kenaikan sewa rumah dinas.
2. Kenaikan sebesar Rp3.446.663 yang berasal dari pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh Negara, Kenaikan ini disebabkan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 781.A/SEK/10/2012 Tentang Pembebanan atau Penetapan Ganti Rugi Kepada Saudara Suparno, SH., selaku Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena akibat kelalaiannya bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan Dinas.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
				Rp.	%
-	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0,00
-	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.735.858	5.567.862	167.996	3,01
-	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	1.403	450	953	211,77
-	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	3.446.663	0	3.446.663	0,00
-	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.868.908	20.128.760	(18.259.852)	(90,71)
-	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.000.000	0	3.000.000	0,00
	Total Pendapatan	14.052.832	25.697.072	(11.644.240)	(45,31)

B.2. Belanja Negara

*Realisasi
Belanja
Negara :*
Rp
10.866.960.056

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 meliputi:
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember TA 2013 adalah sebesar Rp10.866.960.056.
setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 97,58% dari anggaran senilai
Rp11.136.378.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

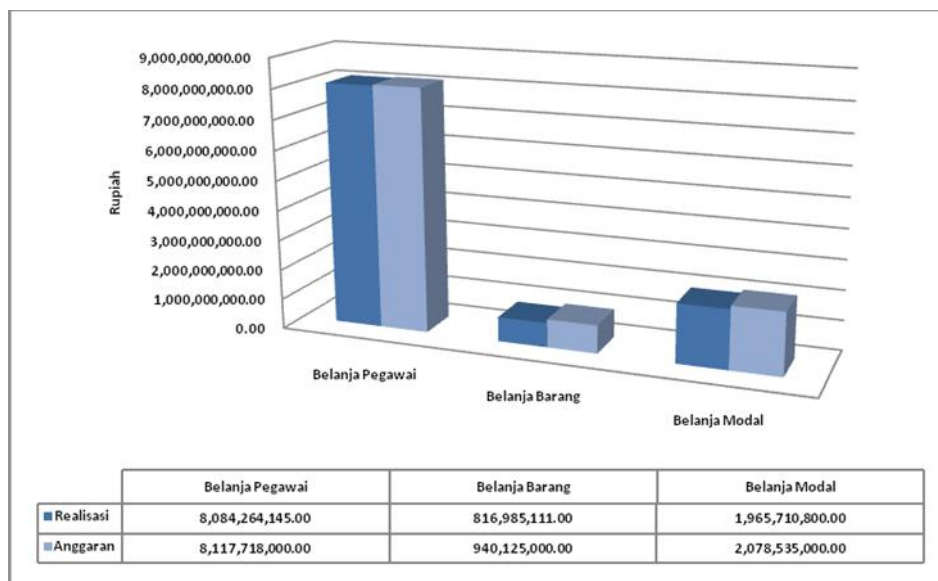
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2013		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.117.718.000	8.084.264.145	99,58
Belanja Barang	940.125.000	816.985.111	86,90
Belanja Modal	2.078.535.000	1.965.710.800	94,57
Total Belanja Bruto	11.136.378.000	10.871.752.471	97,62
Pengembalian Belanja		(4.792.415)	0
Total Belanja Netto	11.136.378.000	10.866.960.056	97,58

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2013 & 2012

Berdasarkan Tabel 9, Perbandingan Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 81,5 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena Kenaikan Gaji Pokok PNS Terhitung tanggal 1 Januari 2013 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Kenaikan Belanja Pegawai juga disebabkan karena Kenaikan Tunjangan Fungsional Hakim Terhitung tanggal 1 November 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung.
3. Kenaikan Belanja Barang secara umum disebabkan karena kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
4. Kenaikan Belanja Modal secara umum disebabkan karena pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis yaitu Pekerjaan Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Perbandingan realisasi belanja TA 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	8.084.264.145	4.804.509.468	3.279.754.677	68,26
Belanja Barang	816.985.111	806.378.641	10.606.470	1,31
Belanja Modal	1.965.710.800	391.227.500	1.574.483.300	402,44
Total Belanja	10.866.960.056	6.002.115.609	4.864.844.447	81,05

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp
8.084.264.145

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS, Belanja Honorarium, Belanja Uang Makan, Belanja Lembur, dan Belanja Uang Duka PNS.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp8.084.264.145. dan Rp4.804.509.468.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.424.984.900	3.079.632.620	345.352.280	11,21
Belanja Pembulatan Gaji PNS	82.654	54.015	28.639	53,02
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	253.980.188	238.589.906	15.390.282	6,45
Belanja Tunj. Anak PNS	84.046.778	81.597.898	2.448.880	3,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	60.980.000	63.140.000	(2.160.000)	(3,42)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.913.520.000	443.490.000	2.470.030.000	556,95
Belanja Tunj. PPh PNS	449.010.060	125.844.350	323.165.710	256,79
Belanja Tunj. Beras PNS	225.691.380	210.425.000	15.266.380	7,25
Belanja Uang Makan PNS	542.072.000	451.795.000	90.277.000	19,98
Belanja Tunjangan Umum PNS	103.700.000	94.205.000	9.495.000	10,07
Belanja Uang Lembur	23.404.000	15.925.000	7.479.000	46,96
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	7.584.600	0	7.584.600	0,00
Total Belanja Brutto	8.089.056.560	4.804.698.789	3.284.357.771	68,35
Pengembalian Belanja	(4.792.415)	(189.321)	(4.603.094)	2.431,37
Total Belanja Netto	8.084.264.145	4.804.509.468	3.279.754.677	68,26

Berdasarkan Tabel 9, Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 68,26 persen dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena Kenaikan Gaji Pokok PNS Terhitung tanggal 1 Januari 2013 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2. Kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional PNS disebabkan karena adanya Kenaikan Tunjangan Fungsional Hakim Terhitung tanggal 1 November 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung.
3. Kenaikan Belanja Uang Makan PNS disebabkan perubahan besaran tarif uang lembur pada PMK Nomor : 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 dari yang semula sebesar Rp20.000. untuk PNS semua golongan menjadi Rp25.000. untuk PNS Golongan I dan II, Rp27.000. untuk PNS Golongan III, dan Rp29.000. untuk PNS Golongan IV.
4. Kenaikan Belanja Lembur disebabkan perubahan besaran tarif uang lembur pada PMK 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 dari yang semula sebesar Rp7.000. untuk PNS Golongan I menjadi Rp10.000, untuk PNS Golongan II semula Rp9.000. menjadi Rp13.000., untuk PNS Golongan III semula Rp11.000 menjadi Rp.17.000,00, untuk PNS Golongan IV semula Rp13.000. menjadi Rp20.000. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Kenaikan Belanja Pegawai juga disebabkan karena adanya Hakim atau Pegawai yang mutasi maupun promosi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga menambah realisasi belanja pegawai TA 2013.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp
816.985.111*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi: Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah maing-masing

sebesar Rp816.985.111. dan Rp806.378.641. Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,31 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang secara umum disebabkan karena kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
2. Kenaikan Belanja Barang Operasional disebabkan SBU Tahun 2012 mengalami kenaikan untuk pembayaran honorarium satpam dan honorarium keuangan juga dikarenakan kenaikan penggunaan listrik serta untuk keperluan sehari-hari perkantoran lainnya.
3. Kenaikan Belanja Barang disebabkan karena kegiatan pemeliharaan gedung dan pengadaan peralatan kantor dilaksanakan lebih awal dibanding tahun sebelumnya.

Namun pada TA 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga mengalami penurunan 11,11 persen pada Belanja Jasa sebesar Rp148.638.713., penurunan 5,77 persen pada Belanja Pemeliharaan sebesar Rp202.819.833., penurunan 32,38 persen pada Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp50.007.700. yang disebabkan karena adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	394.551.940	347.144.740	47.407.200	13,65
Belanja Barang Non Operasional	20.966.925	2.800.000	18.166.925	648,81
Belanja Jasa	148.638.713	167.229.016	(18.590.303)	(11,11)
Belanja Pemeliharaan	202.819.833	215.249.035	(12.429.202)	(5,77)
Belanja Perjalanan Dinas	50.007.700	81.231.450	(23.948.150)	(32,38)
Total Belanja Brutto	816.985.111	813.654.241	3.330.870	0,40
Pengembalian Belanja	0	(7.275.600)	7.275.600	(100)
Total Belanja Netto	816.985.111	806.378.641	10.606.470	1,31

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :
Rp
1.965.710.800

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi: Belanja Modal Gedung & Bangunan serta Belanja Modal Jaringan Instalasi Listrik.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.965.710.800. dan Rp391.227.500. Berdasarkan Tabel 12, Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 402,44 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Modal dikarenakan terdapat pekerjaan renovasi penggantian atap gedung dan renovasi penataan ruang kantor untuk menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Kenaikan Belanja Modal dikarenakan adanya penggantian dan pemasangan instalasi jaringan listrik dan air di dalam gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendukung rencana kerja strategis organisasi agar memaksimalkan pekerjaan sehari-hari.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	343.515.000	(343.515.000)	98,42
Belanja Modal Gedung & Bangunan	1.866.224.600	47.712.500	1.818.512.100	3.811,39
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	99.486.200	0	99.486.200	0,00
Total Belanja Brutto	1.965.710.800	391.227.500	1.574.483.300	402,44
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.965.710.800	391.227.500	1.574.483.300	402,44

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset
Lancar:
Rp16.056.986*

Nilai Aset Lancar Pengadilan Tata Usaha Negara pada TA 2013, meliputi : Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Persediaan.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp16.056.986 dan Rp15.281.149.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	TA 2013	TA 2012
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	3.759.996	3.759.996
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	(18.800)	(18.800)
	Persediaan	12.315.790	11.539.952
	Total Aset Lancar	16.056.986	15.281.149

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Aset Lancar berupa Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disebabkan karena adanya Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 781.A/SEK/10/2012 Tentang Pembebanan atau Penetapan Ganti Rugi Kepada Saudara Suparno, SH., selaku Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena akibat kelalaiannya bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Honda Tiger yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp18.800.000., sehingga selama 5 Tahun (60 Bulan) wajib untuk mengganti dengan mencicil sebesar

Rp.313.333,33., setiap bulannya dari Gaji yang kemudian disetor ke dalam kas Negara melalui SPM Kode Akun Penerimaan 423922 yaitu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Negara.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran :
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara per 31 Desember 2013 dan 2012, meliputi : Saldo Kas di Bank BRI dan Uang Tunai di Brankas.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2013 dan TA 2012 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Namun karena Bendahara Pengeluaran kami telah menyetorkan sisa UP/TUP ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 sehingga tidak ada lagi Saldo Kas.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2013	31 Desember TA 2012
1.	Bank BRI acc 0122-01-000917-30-2	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2013 tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (TPN) 0109060602140313.

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian
Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti
Rugi:
Rp3.759.996*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp3.759.996. dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Per tanggal 31 Desember TA 2013 terdapat kenaikan nilai Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp3759.996 atau naik 100,00% dari nilai Bagian Lancar Tagihan Ganti

Rugi (TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012. Jumlah nilai Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember TA 2013 sebesar Rp3759.996, sedangkan nilai Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi (TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012 sebesar Rp0.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 15 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2013 dan TA 2012**
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember TA 2013	31 Desember TA 2012
1.	Suparno, SH.	3.759.996	3.759.996
	Jumlah	3.759.996	3.759.996

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	3.759.996
Mutasi Tambah	
- TGR a.n. Suparno, SH.	18.800.000
Mutasi Kurang	
- Pelunasan Tahun 2013	3.759.996
- Reklasifikasi menjadi TP/TGR	11.280.008
Saldo per 31 Desember 2013	3.759.996

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi penambahan sebesar Rp18.800.000 atas kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Honda Tiger berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 781.A/SEK/10/2012.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp3.759.996 merupakan pembayaran TGR atas nama Suprano, SH.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp11.280.008. merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR Jangka Panjang sebagai Bagian Lancar di TA 2013 atas kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Honda Tiger sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 781.A/SEK/10/2012.

C.1.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih
-
Bagian
Lancar
TP/TGR :
Rp (18.800)*

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp(18.800). dan Rp0.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Per tanggal 31 Desember TA 2013 terdapat kenaikan nilai Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp(18.800). atau naik 100,00% dari nilai Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012. Jumlah nilai Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember TA 2013 sebesar Rp(18.800)., sedangkan nilai Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012 sebesar Rp0.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Tabel 16 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2013
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1.	Suparno, SH.	Lancar	3.759.996	0.5%	18.800
Total					18.800

C.1.4. Persediaan

*Persediaan:
Rp12.315.790*

Persediaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 dan TA 2012, meliputi : Barang Konsumsi dan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp12.315.790. dan Rp11.539.952.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2013 dan 31 Desember 2012

No.	Uraian	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1.	Barang Konsumsi	12.315.790	11.370.552
2.	Amunisi	0	0
3.	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	169.400
4.	Suku Cadang	0	0
5.	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6.	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7.	Bahan Baku	0	0
8.	Barang dalam Proses	0	0
9.	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10.	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11.	Persediaan lainnya	0	0
	Total	12.315.790	11.539.952

C.2. Aset Tetap

Aset
Tetap :
Rp
15.262.935.694

Nilai Aset Tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar Rp15.262.935.694. dan Rp16.501.259.962. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Aset Tetap TA 2013 dan TA 2012

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012	Perubahan
1.	Tanah	10.149.656.000	10.149.656.000	0
2.	Peralatan dan Mesin	2.392.563.534	2.392.613.562	(50.028)
3.	Gedung dan Bangunan	5.960.527.427	3.945.710.400	2.014.817.027
4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	13.200.000	13.200.000	0
5.	Aset Tetap Lainnya	2.763.400	80.000	2.683.400
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	18.518.710.361	16.501.259.962	2.017.450.399
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.255.774.667)	0	(3.255.774.667)
	Nilai Buku Aset Tetap	15.262.935.694	16.501.259.962	(1.238.324.268)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp
10.149.656.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 dan TA 2012 adalah sebesar Rp10.149.656.000.

Nilai Aset Tetap tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada 2013. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang - Jakarta Timur dan Jl. Rambutan, Pondok Kelapa - Jakarta Timur.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Saldo Tanah TA 2013

(dalam satuan Rupiah)

No	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.01.001.4	1,200m ²	Sertifikat No. 88 an. Hj Sidi Akta Jual Beli No.1586/Cakung/1996	PTUN JAKARTA	Tanah Bangunan Perumahan/ G. Tempat Tinggal Tanah	1.720.800
2.	2.01.01.01.001.3	100m ²	Sertifikat No. 22 an. Pemerintah RI	PTUN JAKARTA	Tanah Bangunan Perumahan/ G. Tempat Tinggal Tanah	39.200
3.	2.01.01.01.001.2	1,100m ²	Sertifikat No. 22 an. Pemerintah RI	PTUN JAKARTA	Tanah Bangunan Perumahan/ G. Tempat Tinggal Tanah	1.423.400
4.	2.01.01.01.001.1	362m ²	Sertifikat Hak Pakai No. 599 Fotocopy IMB No. 7149 / IMB / 1995	PTUN JAKARTA	Tanah Bangunan Perumahan/ G. Tempat Tinggal Tanah	827.690
5.	2.01.01.04.001.1	4,080m ²	Sertifikat BPN Jakarta Timur No. 09. 0510. 04. 4. 00010	PTUN JAKARTA	TanahTempat Kerja/ Gedung Kantor	6.138.566
Jumlah Saldo Tanah						10.149.656.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan
Dan
Mesin :
Rp2.392.563.534

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp2.392.563.534. dan Rp2.392.613.562.

Rincian Nilai Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Peralatan Mesin	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm. Penyusutan Awal	Nilai Buku Per 31-12-2013
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	515,401,000	440,493,858	74,907,142
2	Alat Pengolahan	1	4,675,000	4,675,000	0
3	Alat Kantor	297	342,574,290	298,052,062	44,522,228
4	Alat Rumah Tangga	702	659,913,278	541,495,061	118,418,217
5	Alat Studio	1	2,601,381	2,601,381	0
6	Alat Komunikasi	56	71,813,000	34,096,500	37,716,500
7	Alat Kedokteran	11	30,525,000	17,407,500	13,117,500
8	Unit Alat Laboratorium	4	10,000,000	5,298,438	4,701,562
9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektroni	3	3,795,000	1,012,002	2,782,998
10	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika	3	3	3	0
11	Alat Khusus Kepolisian	1	4,840,000	3,630,000	1,210,000
12	Komputer Unit	78	544,337,686	464,439,251	79,898,435
13	Peralatan Komputer	58	128,363,896	108,466,086	19,897,810
14	Alat Kerja Penerbangan	9	72,930,000	17,094,000	55,836,000
15	Alat Kerja Proses Produksi	1	11,000	11,000	0
16	Peralatan Olahraga	1	33,000	33,000	0
17	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	15	750,000	0	750,000
Jumlah			2,392,563,534	1,938,805,142	453,758,392

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	2.392.613.562
Mutasi Tambah	
	-
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	(50.028)
Saldo per 31 Desember 2013	2.392.563.534
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(1.938.805.142)
Nilai Buku 31 Desember 2013	453.758.392

Mutasi transaksi pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa pengurangan melalui reklasifikasi keluar berupa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga sebanyak 29 buah piala dengan nilai sebesar Rp50.028. sesuai Berita Acara dengan Nomor : W2.TUN.1/750/PL.01/XI/2013.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung
dan
Bangunan :*
Rp5.960.527.427

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp5.960.527.427. dan Rp3.945.710.400.

Tabel 21 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Gedung dan Bangunan	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm. Penyusutan Awal	Nilai Buku Per 31-12-2013
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4	5.232.242.427	1.008.415.543	4.223.826.884
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6	728.285.000	307.814.030	420.470.970
			5.960.527.427	1.316.229.573	4.644.297.854

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012	3.945.710.400
Mutasi Tambah	
- Renovasi Penggantian Atap Gedung dan Renovasi Penataan Ruang Kantor	1.938.309.027
- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap	76.508.000
Mutasi Kurang	
	-
Saldo per 31 Desember 2013	5.960.527.427
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(1.316.229.573)
Nilai Buku 31 Desember 2013	4.644.297.854

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penambahan dari belanja modal Gedung dan Bangunan untuk pekerjaan renovasi penggantian atap gedung serta renovasi penataan ruang kantor dan penambahan dari belanja modal Jaringan Instalasi untuk penggantian serta pemasangan instalasi jaringan listrik sebesar Rp.1.938.309.027.
2. Penambahan reklasifikasi masuk dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp.76.508.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset
Jalan
Irigasi,
Dan
Jaringan :*
Rp13.200.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp13.200.000. dan Rp13.200.000.

Saldo tersebut adalah dari instalasi jaringan pertahanan.

Tabel 22 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm. Penyusutan Awal	Nilai Buku Per 31-12-2013
1.	Jaringan Pertahanan	48	13.200.000	659.952	12.540.048
Jumlah			13.200.000	659.952	12.540.048

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	13.200.000
Mutasi Tambah	
	-
Mutasi Kurang	
	-
Saldo per 31 Desember 2013	13.200.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(659.952)
Nilai Buku 31 Desember 2013	12.540.048

Transaksi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jaringan Pertahanan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena adanya Instalasi Komunikasi Elektronik (Komlek) yang nilainya berkurang karena penyusutan di dalam tanah. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset
Tetap
Lainnya:*
Rp2.763.400

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per

31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp2.763.400. dan Rp80.000.

Tabel 23 Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis Aset Lainnya	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm. Penyusutan Awal	Nilai Buku Per 31-12-2013
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	18	2.683.400	0	2.683.400
2	Barang Bercorak Kesenian	6	80.000	80.000	0
Jumlah			2.763.400	80.000	2.683.400

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	80.000
Mutasi Tambah	2.683.400
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2013	2.763.400
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2013	(80.000)
Nilai Buku 31 Desember 2013	2.683.400

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013 keseluruhannya berasal dari perolehan bahan perpustakaan tercetak (buku perpustakaan) yang berasal dari Mahkamah Agung senilai Rp2.683.400.

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset
tetap :
Rp [3.255.774.667]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp(3.255.774.667) dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2013 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.392.563.534	(1.938.805.142)	453.758.392
2	Gedung dan Bangunan	5.960.527.427	(1.316.229.573)	4.644.297.854
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	13.200.000	(659.952)	12.540.048
4	Aset Tetap Lainnya	2.763.400	(80.000)	12.540.048
	Jumlah	18.518.710.361	(3.255.774.667)	15.262.935.694

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi :
Rp 11.280.008*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp11.280.008. dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Per tanggal 31 Desember TA 2013 terdapat kenaikan nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp11.280.008. atau naik 100,00% dari nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012. Jumlah nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember TA 2013 sebesar Rp11.280.008., sedangkan nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012 sebesar Rp0.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

(dalam satuan Rupiah)

No	Debitur	Jumlah
1.	Suparno, SH.	11.280.008

Jumlah Total	11.280.008
---------------------	-------------------

Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2012	0
Mutasi Tambah	
- TGR a.n. Suparno, SH	18.800.000
Mutasi Kurang	
- Pelunasan TA 2013	(3.759.996)
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	(3.759.996)
Saldo per 31 Desember 2013	11.280.008

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mutasi penambahan sebesar Rp18.800.000 atas kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Honda Tiger berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 781.A/SEK/10/2012.
- Mutasi pengurangan sebesar Rp3.759.996 merupakan pembayaran TGR atas nama Suprano, SH.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR : Rp(56.400) Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp(56.400) dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Per tanggal 31 Desember TA 2013 terdapat kenaikan nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp(56.400). atau naik 100,00% dari nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012. Jumlah nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember TA 2013 sebesar Rp(56.400)., sedangkan nilai

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pertanggal 31 Desember TA 2012 sebesar Rp0.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

**Tabel 26 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1.	Suparno, SH.	Lancar	11.280.008	0.5%	56.400
Total					56.400

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya:
Rp 103.360.000
Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Aset tak Berwujud Aset Lain-lain.

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp103.360.000. dan Rp179.902.006.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2013	TA 2012
1.	Aset tak Berwujud	103.360.000	103.360.000
2.	Aset Lain-lain	34.006	76.542.006
3.	Nilai perolehan Aset Lainnya	103.394.006	179.902.006
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(34.006)	0
5.	Nilai buku Aset Lainnya	103.360.000	179.902.006

C.4.1. Aset Tak berwujud

Aset Tak
Berwujud :
Rp
103.360.000

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp103.360.000. dan Rp103.360.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa Software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 28 Rincian Aset tak Berwujud

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Software	103.360.000
	Jumlah Total	103.360.000

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset
Lain-lain :
Rp34.006

Saldo aset lain-lain yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Software.

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp34.006. dan Rp76.542.006.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2012	76.542.006
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	76.508.000
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Saldo per 31 Desember 2013	34.006

Mutasi pengurangan terjadi karena pada semester I TA 2013 terdapat reklasifikasi keluar aset tetap yang tidak digunakan dan reklasifikasi masuk ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp76.508.000. sehingga pada semester II TA 2013 saldo yang tersisa hanya sebesar

Rp34.006.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp84.694.550 Nilai Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013, meliputi : Utang Kepada Pihak Ketiga.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp84.694.550 dan Rp414.672.600.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2012 tercatat sebesar Rp414.672.600.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2013 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 29 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Utang Kepada Pihak Ketiga	84.694.550	414.672.600
Jumlah	84.694.550	414.672.600

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp84.694.550 Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp84.694.550 dan Rp414.672.600.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayarkan	84.694.550	Kekurangan Uang Makan untuk 92 Pegawai Bulan November dan Desember 2013

Jumlah	84.694.550
---------------	-------------------

Utang kepada Pihak Ketiga yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena adanya Kekurangan Uang Makan untuk 92 Pegawai Bulan November dan Desember 2013 sebesar Rp84.694.550.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas Dana Lancar

*Cadangan
Piutang:
Rp.
(68.618.764)*

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember TA 2013 dan TA 2012 tercatat sebesar Rp(68.618.764) dan Rp(399.372.652). Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada tabel di bawah :

Tabel 31 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2013	TA 2012
Cadangan Piutang	3.759.996	3.759.996
Cadangan Persediaan	12.315.790	11.539.952
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(414.672.600)
Jumlah	(68.618.764)	(399.372.652)

C.6.1. Cadangan Piutang

*Cadangan
Piutang:
Rp3.759.996*

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp3.759.996. dan Rp3.759.996. merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan: Rp12.315.790 Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp12.315.790 dan Rp11.539.952. merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam bentuk persediaan.

C.6.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek: Rp(84.694.550) Jumlah Dana yang harus disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp(84.694.550). dan Rp(414.672.600).

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

C.7. Ekuitas Dana Investasi

C.7.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap: Rp. 15.262.935.694 Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp15.262.935.694 dan Rp16.501.259.962.
Ekuitas Dana Investasi Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

C.7.2. Investasi Aset Lainnya

Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya: Rp114.564.809 Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp114.564.809 dan Rp194.848.011.
Ekuitas Dana Investasi Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. Pengungkapan Penting Lainnya

D.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

1. Berdasarkan Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN.1/05/KU.01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Keuangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk DIPA-005.01.2.526732/2013 tanggal 05 Desember 2012 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : Wahidin, SH., MM.
Pejabat Pembuat Komitmen : Ono Haryono, SE.
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Murwanti, SH.
Bendahara Pengeluaran : Nanik Setyorini

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Wahidin, SH., MM.
Pejabat Pembuat Komitmen : Ono Haryono, SE.
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Murwanti, SH.
Bendahara Pengeluaran : Afikri, SE.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 dalam Anggaran DIPA terdapat Tanda Bintang (Blokir) yang menyebabkan kendala terhadap realisasi Belanja Modal dan baru dibuka pada tanggal 5 Juni 2013.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 terdapat pembebanan Ganti Rugi kepada Suparno, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas hilangnya Kendaraan Roda 2 yaitu Sepeda Motor Honda Tiger sebesar Rp18.800.000. yang kemudian dicicil sebesar Rp313.333. selama jangka waktu 5 (lima) Tahun dan disetor ke dalam kas negara melalui SPM mata anggaran penerimaan 423922 (Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Negara) yang dibayarkan mulai dari awal tahun bulan Januari 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 781.A/SEK/10/2012.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 mengalami 3 (tiga) kali Revisi terhadap anggaran DIPA TA 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Revisi ke 01 Nomor: DIPA-005.05.2.526732/2013 tanggal 5 Juni 2013
 2. Revisi ke 02 Nomor: DIPA-005.05.2.526732/2013 tanggal 21 Agustus 2013
 3. Revisi ke 03 Nomor: DIPA-005.05.2.526732/2013 tanggal 13 September 2013

D.2. Pengungkapan Lain-lain

D.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terdapat temuan BPK sehingga tidak ada tindak lanjut temuan dari BPK.

D.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang disajikan dalam lampiran catatan laporan keuangan.

D.2.3. Rekening Pemerintah

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 3 (tiga) Rekening Pemerintah untuk menampung Anggaran DIPA antara lain sebagai berikut :

No.	Nomor Rekening	Rekening Atas Nama	Nama Bank	Jenis Rekening	Kategori	Tujuan Pembukaan	Izin Pembukaan
1.	0122-01-000917-30-2	Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara	Giro	Bendahara Pengeluaran	Penampung DIPA BUA 01	KPPN
2.	0122-01-001475-30-3	Bend Pengeluaran PTUN Jakarta	Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara	Giro	Bendahara Pengeluaran	Penampung DIPA dirjen 05	KPPN
3.	0122-01-000912-30-2	Biaya Perkara PTUN Jakarta	Bank Rakyat Indonesia Cabang Jatinegara	Giro	Bendahara Penerimaan	Penampung PNBPN	KPPN

D.2.4. Revisi DIPA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan 3 (tiga) kali revisi terhadap anggaran DIPA TA 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke 01 Nomor: DIPA-005.05.2.526732/2013 tanggal 5 Juni 2013
2. Revisi ke 02 Nomor: DIPA-005.05.2.526732/2013 tanggal 21 Agustus 2013
3. Revisi ke 03 Nomor: DIPA-005.05.2.526732/2013 tanggal 13 September 2013

4.

D.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada TA 2013 mengajukan 2 (dua) kali permohonan perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1. DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan atas dokumen		SSPB	SSPB		
Dokumen No. W2.TUN1/ /KU.04.2/X/2013		Tanggal Dok. : 21 - 10- 2013	Tanggal Setor : 22 - 10- 2013		
Uraian : PERBAIKAN SURAT SETORAN SSPB.					

Semula (kode)			Menjadi (kode)		
SATKER	PROGRAM	Rp.	SATKER	PROGRAM	Rp.
526732	005	913,200	526732	001	913,200
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
526732	005	202,500	526732	001	202,500
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
Jumlah		1,115,700	Jumlah		1,115,700

TABEL 2. DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Perbaikan atas dokumen		SSPB	SSPB		
Dokumen No. W2.TUN1/ /KU.04.2/XI/2013		Tanggal Dok. : 15 - 11- 2013	Tanggal Setor : 15 - 11- 2013		
Uraian : PERBAIKAN SURAT SETORAN SSPB.					

Semula (kode)			Menjadi (kode)		
SATKER	PROGRAM	Rp.	SATKER	PROGRAM	Rp.
526732	005	2,973,850	526732	001	2,973,850
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
526732	005	675,000	526732	001	675,000
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
Jumlah		3,648,850	Jumlah		3,648,850

D.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pada akun Belanja Modal untuk DIPA 2013 perlu dicatat bahwa **533111** Belanja Modal Gedung dan Bangunan seharusnya **533121** Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dan **534131** Belanja Modal Jaringan seharusnya **533121** Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

LAPORAN PENDUKUNG

***A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN,
& NILAI BUKU ASET TETAP***

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013

2013 No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin				
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	515.401.000	440.493.858	74.907.142
2.	Alat Pengolahan	1	4.675.000	4.675.000	0
3.	Alat Kantor	297	344.804.297	300.282.069	44.522.228
4.	Alat Rumah Tangga	702	664.722.301	546.370.084	118.418.217
5.	Alat Studio	1	2.601.381	2.601.381	0
6.	Alat Komunikasi	56	71.813.000	34.096.500	37.716.500
7.	Alat Kedokteran	11	30.525.000	17.407.500	13.117.500
8.	Unit Alat Laboratorium	4	10.000.001	5.298.439	4.701.562
9.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	3	3.795.000	1.012.002	2.782.998
10.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3	3	3	0
11.	Alat Khusus Kepolisian	1	4.840.000	3.630.000	1.210.000
12.	Komputer Unit	78	544.337.690	464.439.255	79.898.435
13.	Peralatan Komputer	58	128.363.908	108.466.098	19.897.810
14.	Alat Kerja Penerbangan	9	72.930.000	17.094.000	55.836.000
15.	Unit Peralatan Proses/produksi	1	1	11.000	0
16.	Peralatan Olah Raga	1	33.000	33.000	0
B.	Gedung dan Bangunan	10	5.960.527.427	1.316.229.573	4.644.297.854
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4	5.232.242.427	1.008.415.543	4.223.826.884
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6	728.282.000	307.814.030	420.470.970
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48	13.200.000	659.952	12.540.048
1.	Instalasi Pertahanan	48	13.200.000	659.952	12.540.048
D.	Aset Tetap Lainnya	19	2.763.400	80.000	2.683.400
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	18	2.683.400	0	2.683.400
2.	Barang Bercorak Kesenian	1	80.000	80.000	0
3.	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-			
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	8	34.006	34.006	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	-			
2.	Alat Kantor	6	19.005	19.005	0
3.	Alat Rumah Tangga	2	15.001	15.001	15.262.935.694
4.	Alat Komunikasi	-			
5.	Komputer Unit	-			
6.	Peralatan Komputer	-			
7.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-			
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			18.523.052.008	3.262.799.714	15.260.252.294
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap & Aset Lainnya			18.525.849.414	3.262.913.720	15.262.935.694

B. INFORMASI PENDAPATAN & BELANJA SECARA AKRUAL

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



005

01

0100

526732

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2013

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT